

FAKTOR-FAKTOR PENENTU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

¹Scan Yani²Tri Kunawangsih Purnamaningrum

¹²Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti

Email : yani025042001042@std.trisakti.ac.id, trikunawangsih@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud guna mengkaji pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Luas Daerah, dan Tingkat Inflasi pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Data tersebut terdiri dari statistik Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Luas Daerah, dan Inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, beserta laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara tahun 2014 hingga 2022. Pemilihan sampel melibatkan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mempergunakan metode analisis regresi data panel melalui Eviews 9 untuk pengolahan data. Hasil penelitian memperlihatkan korelasi positif antara variabel Jumlah Penduduk dengan Pajak Bumi dan Bangunan, korelasi positif antara variabel Produk Domestik Regional Bruto dengan Pajak Bumi dan Bangunan, korelasi negatif antara variabel Luas Daerah dengan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tidak ada korelasi antara Inflasi dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Luas Daerah, Tingkat Inflasi, dan Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

This research objective is to assess the impact of Population, Gross Regional Domestic Product, Size Area, and Inflation Rate on Land and Building Tax Revenue. The data consists of Population Number, Gross Regional Domestic Product, Size Area, and Inflation Rate statistics obtained from the Central Regency and City Statistics Agency in Banten Province, along with reports on Land and Building Tax Revenue between 2014 and 2022. Sample selection involves a purposive sampling technique. The research employs a panel data regression analysis method applying Eviews 9 for data processing. The findings indicate a positive correlation between the Population Number variable and Land and Building Tax, a positive correlation between the Gross Regional Domestic Product variable and Land and

Building Tax, a negative correlation between the Size Area variable and Land and Building Tax, and a no correlation between the inflation rate variable and land and building tax.

Keywords: Population, Gross Regional Domestic Product, Size Area, Inflation Rate and Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Pungutan yang wajib diberikan kepada negara, baik oleh individu maupun badan, merupakan pajak yang harus dipenuhi sehuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang. Pengenaan pajak merupakan salah satu cara pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk mengatur anggaran pembangunan dan administrasi negara, sambil juga digunakan untuk mengimplementasikan aturan-aturan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Terdapat dua jenis pajak yang memiliki otoritas dan metode penagihan yang berbeda dalam pengelolaan pendapatan, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

Pendapatan bagi pemerintah daerah bersumber dari pajak daerah, yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak daerah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diterapkan berdasarkan keberadaan tanah dan bangunan, dan besaran tarifnya di tentukan oleh kondisi objek bumi atau bangunan dengan dampak signifikan.

Tabel 1. Data PBB, Jumlah Penduduk, PDRB, Luas Daerah dan Inflasi di Provinsi Banten

Tahun	PBB (Juta Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	Luas Daerah (KM ²)	Inflasi (%)
2014	387,127,819,707	23,409,754	349,584,668	9,281.08	10.64
2015	423,257,751,551	23,910,486	369,209,288	9,281.08	4.50
2016	1,120,703,529,517	24,406,296	389,543,932	9,281.08	3.87
2017	1,210,494,154,139	24,896,320	412,639,618	9,281.08	4.36
2018	1,310,228,391,199	25,379,472	436,581,428	9,281.08	3.81
2019	1,555,558,053,485	25,854,632	459,666,416	9,281.08	4.36
2020	1,499,135,784,868	23,809,124	444,265,086	9,662.92	2.31
2021	1,611,498,616,359	24,122,950	463,469,620	9,662.92	2.76
2022	1,872,085,449,451	24,413,970	487,663,415	9,352.77	5.60

Sumber: <https://banten.bps.go.id>

Dilihat pada tabel 1 bahwa PBB, Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi mengalami fluktuatif. Supaya temuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

mampu terealisasi berdasarkan target, maka perlu diketahui dari faktor-faktor yang membawa dampak pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan akan berbagai fasilitas, termasuk perumahan, kian mengalami peningkatan. Tanah dan bangunan merupakan objek Pajak Bumi dan bangunan yang jumlah dan nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun maka dari itu pada akhirnya nantinya menjadikan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan kian meningkat (Budiharjo, 2023).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan keadaan ekonomi nasional setiap tahun, dan peningkatan pendapatan per individu di suatu wilayah menunjukkan kemampuan rakyatnya untuk mendukung pengeluaran sehari-hari dan proyek pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketika pendapatan per kapita suatu daerah meningkat, demikian pula sumber pendapatan potensial untuk daerah itu. Sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak meningkat.

Luasnya tanah dan/atau bangunan di wilayah tertentu membawa dampak signifikan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengingat perhitungan PBB sering kali mengandalkan persentase yang berasal dari nilai properti di wilayah tersebut. Pajak ini dikenakan pada pemilik properti dan biasanya diatur oleh pemerintah daerah.

Inflasi ialah kondisi dimana tingkat umum dari harga barang dan jasa kian meningkat, alhasil daya pembeli menurun. Inflasi umumnya diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Jika indeks tersebut mengalami kenaikan, maka hal tersebut menunjukkan adanya inflasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendanaan daerah disebut Pendapatan Daerah Asal, yang diperoleh dari pajak, retribusi, pengelolaan harta terpisah, dan pendapatan daerah asal lainnya, sejalan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa faktor, antara lain belanja pemerintah, PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk, membawa dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kapasitas pembayaran masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah, yang merupakan pengaruh PAD melalui PDRB. Ketika peningkatan sumber daya manusia (SDM) bertepatan dengan peningkatan bakat dan kreativitas dalam angkatan kerja ini, yang mengarah pada lonjakan ide dan pertumbuhan sumber daya manusia, itu berdampak positif pada populasi, mempengaruhi kemajuan teknologi.

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, suatu daerah wajib membayar pajak daerah wajib kepada perorangan atau badan yang berutang tetapi tidak menerima manfaat yang setara atau langsung. Dana tersebut dapat dihimpun berdasarkan ketetapan undang - undang yang ada dan dipergunakan dalam mendanai pembangunan daerah dan operasional pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Keberadaan tanah dan bangunan menentukan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu pajak yang signifikan adalah PBB. Akibatnya, kondisi bangunan atau objek bumi menentukan tarifnya.

Laut Republik Indonesia, serta daratan dan perairan pedalaman (seperti kolam, rawa dan perairan), membentuk permukaan bumi. Bangunan, di sisi lain, adalah kreasi teknik yang secara permanen berlabuh ke tanah atau struktur lainnya. Selain itu, berikut ini termasuk dalam definisi bangunan: kolam renang, kilang minyak, jalan tol, pagar mewah, arena olahraga, galangan kapal, taman mewah, dermaga, minyak dan gas, tempat penampungan, jaringan pipa minyak, dan fasilitas bermanfaat lainnya (Mardiasmo, 2016).

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi seperti halnya pekerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan, dan pengusaha dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Populasi adalah jumlah orang yang menempati wilayah atau negara tertentu setidaknya selama satu tahun ketika pengumpulan data populasi atau sensus dilakukan. Ada tiga faktor dominan yang membawa dampak pada laju pertumbuhan penduduk, yakni angka kematian, angka kelahiran, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk.

H₁: Terdapat pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Produk Domestik Regional Bruto

Istilah Produk Domestik Regional Bruto, atau PDRB, mengacu pada total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi kawasan. PDRB dihitung dalam rangka memberikan informasi yang menggambarkan kinerja ekonomi daerah, membantu dalam pembuatan perencanaan atau kebijakan daerah, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto berfungsi sebagai indikator penting dalam mengidentifikasi keadaan ekonomi sebuah daerah pada periode tertentu, baik berdasarkan harga saat ini ataupun berdasarkan nutrisi yang konstan.

H₂: Terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Luas Daerah

Tanah adalah sumber daya yang memiliki potensi untuk menyediakan ruang yang mendukung segala kebutuhan makhluk hidup. Ketersediaan ruang ini sangat terbatas, sementara permintaan untuk lahan terus meningkat seiring waktu, terutama untuk keperluan pertanian, perumahan, industri, dan lainnya. Dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, permintaan akan tanah juga akan terus meningkat. (Afriyanah, 2015)

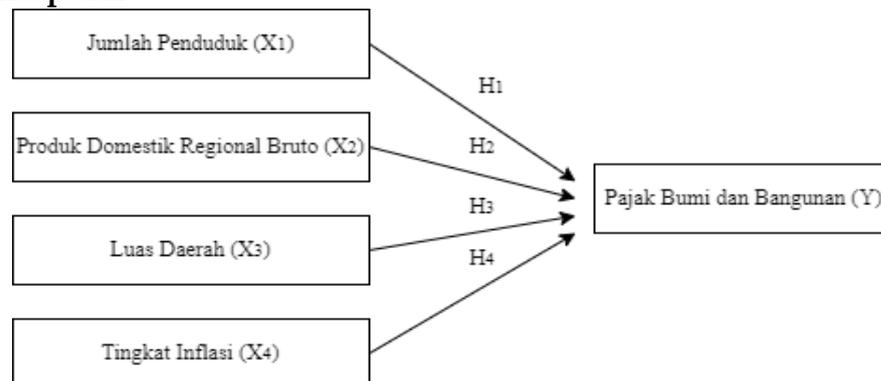
H₃: Terdapat pengaruh Luas Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat Inflasi

Inflasi ialah sebuah kondisi dimana harga barang dan jasa dengan terus-menerus menghadapi kenaikan, maka daya beli uang menurun. Inflasi umumnya diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Jika indeks tersebut mengalami kenaikan, maka hal tersebut menunjukkan adanya inflasi. Inflasi memiliki dampak ekonomi yang kompleks. Apabila tingkat inflasi moderat mungkin dikatakan normal dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi mampu menimbulkan ketidakpastian, mengurangi daya beli masyarakat, dan mempengaruhi keputusan investasi dan konsumen. Oleh karena itu, banyak pemerintah dan bank sentral yang berusaha untuk menjaga tingkat inflasi yang stabil melalui kebijakan moneter dan fiskal.

H₄: Terdapat pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan yakni data sekunder mencakup data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyediakan data yang dipergunakan. Data penelitian kependudukan didapatkan melalui laporan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014–2022, serta data Jumlah Penduduk, Produk Daerah

Bruto, Luas Daerah, dan Tingkat Inflasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Metodologi penelitian selanjutnya untuk pengujian hipotesis melibatkan penggunaan analisis regresi data panel untuk menilai data yang terstruktur sebagai deret waktu dan penampang, menggunakan model regresi data panel yang sesuai melalui *Microsoft Excel*. Alat analisis yang dipergunakan untuk penelitian ini yakni aplikasi statistik *Eviews 9*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	PBB	JP	PDRB	LD	INF
Mean	152,641.87	1,529,188	52,953.11	1,171.737	4.616250
Median	53,456.68	1,382,630	52,482.50	639.2850	3.945000
Maximum	579,294.29	3,800,787	112,780.0	3,426.560	11.27000
Minimum	4,180,000	405,271.0	15,097.00	147.1900	0.140000
Std. Dev.	176,951.09	881,924.4	31,073.62	1,163.224	2.702639
Observations	72	72	72	72	72

Sumber: data diolah dengan *Eviews9*, 2023

Pajak Bumi dan Bangunan dengan ukuran sampel 72 memiliki nilai minimal 4.180.000 di Kota Tangerang dan di Kabupaten Tangerang memiliki nilai maksimal 579.294,29. Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai rata-rata 152.641,87. Nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 176.951,09, yang menunjukkan bahwa terdapat variasi pajak bumi dan bangunan antara satu kabupaten/kota dengan kota lainnya, dikarenakan nilai standar deviasi yang didapat lebih tinggi dari nilai rata-rata yang diperoleh.

Jumlah Penduduk dengan ukuran sampel 72 jiwa memiliki nilai minimal 405.271,0 jiwa di Kota Cilegon dan di Kabupaten Tangerang memiliki nilai maksimum 3.800.787. Jumlah penduduk dengan nilai rata-rata 1.529.188. Nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 881.924,4, yang menunjukkan bahwa tidak ada variasi jumlah penduduk antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, karena nilai standar deviasi yang didapat lebih rendah dari nilai rata-rata yang diperoleh.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan ukuran sampel 72 memiliki nilai minimal 15.097,00 di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang memiliki nilai maksimal 112.780,0. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai rata-rata 52.953,11. Nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 31.073,62, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi Produk Domestik Regional Bruto antara

satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, karena nilai standar deviasi yang didapat lebih rendah dari nilai rata-rata yang diperoleh.

Luas Daerah dengan ukuran sampel 72 memiliki nilai minimal 147.1900 di Kota Tangerang Selatan, dan di Kabupaten Lebak memiliki nilai maksimal 3.426.560. Luas Daerah dengan nilai rata-rata 1.171,737. Nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 1.163,224, yang menunjukkan bahwa tidak ada variasi luas antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, karena nilai standar deviasi yang didapat lebih rendah dari nilai rata-rata yang diperoleh.

Tingkat Inflasi dengan ukuran sampel 72 memiliki nilai minimum 0.14 di Kota Tangerang Selatan, dan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang memiliki nilai maksimal 11.27. Tingkat Inflasi dengan nilai rata-rata 4.616250. Nilai standar deviasi yang diperoleh 2.702639 yang menunjukkan bahwa tidak adanya variasi tingkat inflasi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, dikarenakan nilai standar deviasi yang didapat lebih rendah dari nilai rata-rata yang diperoleh.

Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 3. Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2.532094	(7,60)	0.0237
<i>Cross-section Chi-square</i>	18.635614	7	0.0094

Sumber: data diolah dengan Eviews9, 2023

Hasil pengujian ditunjukkan dari tabel 3 dengan nilai *p-value Cross section chi-square* $0.0094 < 0.05$, yang berarti H_0 ditolak (H_a diterima) dan dapat dikatakan bahwa model yang tepat yakni Fixed Effect Model (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	15.897283	4	0.0032

Sumber: data diolah dengan Eviews9, 2023

Hasil pengujian ditunjukkan dari tabel 4 dengan nilai *p-value Cross section chi-square* $0.0032 < 0.05$, yang berarti H_0 ditolak (H_a diterima) dan mampu dinyatakan jika model yang tepat yakni Fixed Effect Model (FEM).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.788831
Adjusted R-squared	0.750117

Sumber: data diolah dengan Eviews9, 2023

Menurut tabel 5 memperlihatkan jika nilai Adjusted (R^2) sebesar 0.750117, maka menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk, PDRB, Luas Daerah, dan Tingkat Inflasi mampu menjelaskan variabel Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 75.01%. Sementara itu sisanya yaitu sebanyak 24.99% diberikan pengaruh oleh variabel lain yang tidak dikaji pada model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6. Uji F

<i>F-statistic</i>	20.37570
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: data diolah dengan Eviews9, 2023

Menurut data pada tabel 6, didapatkan nilai *Prob (F-statistic)* $0.000000 < 0.05$, maka H_0 ditolak (H_a diterima). Mampu ditarik kesimpulan bahwasanya minimal terdapat 1 variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

Uji t

Tabel 7. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43000000	5.090000	0.084652	0.9328
JP	95788.14	17576.10	5.449908	0.0000
PDRB	1693.412	629.6959	2.689253	0.0093
-				
LD	32433742	13392729	-2.421743	0.0185

INF 10800000 7.260000 -1.486909 0.1423

Sumber: data diolah dengan Eviews9, 2023

Berdasarkan hasil jumlah Penduduk, nilai p-value $0.0000 < 0.05$ dengan nilai koefisien beta 95788.14 dengan arah positif, maka H_{a1} diterima, dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk membawa dampak positif pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Produk Domestik Regional Bruto, nilai p-value $0.0093 < 0.05$ dengan nilai koefisien beta 1693.412 dengan arah positif, maka H_{a2} diterima, dan mampu ditarik kesimpulan bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Luas daerah, nilai p-value $0.0185 < 0.05$ dengan nilai koefisien beta -32433742 dengan arah positif, maka H_{a3} diterima, dan mampu ditarik kesimpulan bahwasanya Luas Daerah berpengaruh negatif pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Tingkat Inflasi, nilai p-value $0.1423 < 0.05$ dengan nilai koefisien beta 1693.412 dengan arah positif, maka H_{a4} diterima, dan mampu ditarik kesimpulan bahwasanya Tingkat Inflasi tidak berpengaruh pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Bumi dan bangunan

Menurut tabel 7, Koefisien beta 9,726581 dengan nilai p-value $0,0000 < 0,05$, menunjukkan korelasi positif antara variabel Jumlah Penduduk dan Pajak Bumi dan Bangunan. jumlah penduduk berfungsi sebagai indikator kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu populasi yang lebih besar sesuai dengan lebih banyak pendapatan pajak tanah dan bangunan.

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dijalankan oleh Ari Budiharjo (2023), memperlihatkan bahwasanya penduduk membawa dampak positif pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten atau kota. Mengelola populasi secara efisien, khususnya melalui peningkatan keterampilan dan peningkatan pendidikan, dapat memanfaatkan potensi populasi yang cukup besar, berkontribusi secara signifikan terhadap proses pembangunan. Semakin tinggi populasi, semakin tinggi penerimaan pajak

Namun, ini berbeda dengan temuan penelitian Irfan (2010), menunjukkan bahwa peningkatan populasi tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan PBB. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk bukanlah faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan PBB.

Pengaruh Produk Domestik Regional Brruto terhadap Pajak Bumi dan bangunan

Tabel 8 menunjukkan koefisien beta 1693.412 melalui nilai p-value $0,0093 < 0,05$, menandakan hubungan positif antara variabel PDRB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak bumi dan bangunan mengalami pertumbuhan seiring dengan Produk Domestik Regional Bruto.

Hal ini serah dengan penelitian Lisna Lisnawati (2020), memperlihatkan korelasi positif antara PDRB dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten atau kota. Ketika PDRB meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, akibatnya mengarah pada peningkatan pendapatan pajak tanah dan bangunan di wilayah tersebut.

Namun, hal ini bertentangan dengan temuan dari penelitian Lutfi dan Mike (2022), yang memperlihatkan bahwasanya PDRB tidak mempunyai dampak substansial pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil tersebut memperlihatkan adanya variabel lain yang memberikan pengaruh yang lebih nyata terhadap perubahan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya peraturan yang tegas dari pemerintah, sosialisasi pajak, sanksi tegas dan tidak pandang bulu dan berbagai variabel lainnya.

Pengaruh Luas Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pemaparan Tabel 8, koefisien beta adalah -32433742 dan p-value adalah $0,0185 < 0,05$. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel luas melemahkan hubungan antara Pajak Bumi dan Bangunan atau berdampak negatif terhadapnya.

Sebaliknya, hal ini kontras dengan temuan penelitian Windah, Darwin, dan Bagudek (2020), menunjukkan bahwa faktor regional memang berdampak pada penerimaan PBB. Semakin besar luas tanah, semakin besar pendapatan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh koefisien beta -10800000 dengan p-value $0.1423 > 0.05$ yang artinya variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dijalankan oleh Trigiant, dkk. (2014) bahwasanya tingkat inflasi tidak berpengaruh secara parsial pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sasana (2005) yang membuktikan bahwasanya pengaruh inflasi membawa dampak pada penerimaan PBB dikarenakan peningkatan inflasi tidak mampu mempengaruhi kenaikan yang lebih besar pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bermaksud guna mengeksplorasi pengaruh variabel independen seperti ukuran populasi, produk domestik regional bruto, dan luas mempengaruhi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Karena data memerlukan interpolasi, 72 sampel data digunakan, mewakili 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten. Dari sampel ini, temuan berikut diambil:

1. Jumlah Penduduk memiliki positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Luas Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Implikasi

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yakni diantaranya seperti berikut:

1. Penelitian ini mempergunakan data panel dengan jumlah sampel data yang sangat terbatas dan sedikit variabel.
2. Penelitian ini melibatkan interpolasi data untuk analisis.
3. Penelitian ini hanya dilakukan selama sembilan tahun.

Saran

Mengingat hasil analisis diskusi dan banyak kesimpulan penelitian, temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hasil di masa depan, termasuk:

1. Untuk memudahkan penelitian di masa depan tentang topik terkait menggunakan objek yang berbeda, diharapkan akan menjadi bahan pendidikan bagi akademisi untuk lebih memahami analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Luas wilayah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Memperluas penelitian dengan memperkenalkan beragam variabel atau memanfaatkan sampel dari kabupaten atau kota di luar yang diteliti dalam penelitian ini disarankan untuk eksplorasi lebih lanjut.
3. Dalam penelitian ini, waktu yang digunakan hanya 9 tahun (2014-2022), diharapkan penelitian kedepannya dapat memakan waktu pengamatan yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyanah, & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB). *Ultima Accounting*, 36-53.

- Afriyanah, & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB). *Ultima Accounting*, 36-53.
- BPS. (2010). *Produk Domestik regional Bruto (Lapangan usaha)*. Retrieved from Bapada pusat Statistika: <https://banten.bps.go.id/indicator/52/312/4/pdrb-adhk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- BPS. (2010). *Produk Domestik regional Bruto (Lapangan usaha)*. Diambil kembali dari Bapada pusat Statistika: <https://banten.bps.go.id/indicator/52/312/4/pdrb-adhk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- BPS. (2016). *Laju Inflasi di 90 Kota*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/3/838/4/laju-inflasi-90-kota-di-indonesia.html>
- BPS. (2020, September). *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan AKbupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa) Tahun 2020-2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistika: <https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- BPS. (2020, September). *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan AKbupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa) Tahun 2020-2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistika: <https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Budiharjo, A. (2003). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Tesis MIESP UNDIP*.
- Budiharjo, A. (2003). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Tesis MIESP UNDIP*.
- DJPK. (2015). *Realisasi Pendapatan APBD 2014*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- DJPK. (2015). *Realisasi Pendapatan APBD 2014*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- DJPK. (2016). *Realisasi Pendapatan APBD 2015 Per Jenis Pajak Daerah*. Retrieved from Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- DJPK. (2016). *Realisasi Pendapatan APBD 2015 Per Jenis Pajak Daerah*. Diambil kembali dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- DJPK. (2017). *Realisasi Pendapatan APBD 2017 Per Jenis Pajak Daerah*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- DJPK. (2017). *Realisasi Pendapatan APBD 2016 Per Jenis Pajak Daerah*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

- DJPk. (2017). *Realisasi Pendapatan APBD 2016 Per Jenis Pajak Daerah*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Hasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Dinamika Pembangunan*, 19-29.
- Hasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Dinamika Pembangunan*, 19-29.
- Hayes, H. G. (1920). The Capitalization of the Land Tax. *The Quarterly Journal of Economics*, 373-380 .
- Lichfield, N. (1997). Land and Value Taxation. *Land Value Taxation in Britain for the Benefit of the Community: History, Achievements and Prospects*, 2-19.
- Lisnawati, L. (2020). Pengaruh Faktor Demografis dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Daerah di 18 Kabupaten di Jawa Barat. *Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia*, 108-219.
- Lisnawati, L. (2020). Pengaruh Faktor Demografis dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Daerah di 18 Kabupaten di Jawa Barat. *Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia*, 108-219.
- Luthfi, M., & Triani, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 65-76.
- Luthfi, M., & Triani, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 65-76.
- Muharam, S. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 65-77.
- Muharam, S. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 65-77.
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2*, 49-59.
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2*, 49-59.

- Realisasi Pendapatan APBD 2018-2022.* (2023). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Trigiant, J., Dandes, R., & Ethika, E. (2014). Kajian Empiris Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 5.1.